

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Volume 14, Nomor 1, April 2016

ISSN 1410-2293

Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta)

Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyningsih

Pengaruh Tekanan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan *Job Relevant Information* sebagai Variabel Mediator

Zaenal Afifi dan Nanik Ermayanti

Perencanaan Karir Untuk Meningkatkan Kesadaran Karir Pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Niaga Politenik NSC Surabaya

Dyah Widowati

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Reputasi Perusahaan terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen

Murni Sulistyowati, Septiana Novita Dewi dan Aris Tri Haryanto

Waste Utilization of Renewable Energy Sources Know to be Useful (Biogas)

Noor Azis, Masruki Kabib dan Dwi Soegiarto

Optimalisasi Pemanfaatan Aset Terminal Kartasura Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo

Triyanto, Betty Eliya Rokhmah dan Ahmad Sidiq

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tri Prastiwi, Muhammad Arfan dan Darwanis

Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Laba

Lita Yulita Fitriyani, Marita dan Cahayani Budi Astuti

Pengaruh Kontribusi Pertambangan terhadap Ekspor pada Kontribusi Pertanian terhadap Ekspor di Indonesia Periode 2007-2013

Sultan

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Volume 14, Nomor 1, April 2016

ISSN 1410-2293

SUSUNAN REDAKSI BULETIN EKONOMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" YOGYAKARTA

| | |
|--------------------|---|
| Penanggung Jawab 1 | : Dekan FEB UPN "Veteran" Yogyakarta. Dr. Winarno, MM |
| Penanggung Jawab 2 | : Drs. Purwiyanta, M.Si |
| Redaktur | : Dr. M. Irhas Effendi, M.Si |
| Penyunting/Editor | : Dr. Heru Tri Sutiono, M.Si Dra. Sri Wahyuni Widiastuti, M.Sc Dr. C. Ambar Pujiharjanto, MS |
| Reviewer | : Prof. Dr. Didit Welly Udjianto, MS Prof. Dr. Arief Subyantoro, MS Dr. Haddy Suprpto, MS Dr. Yuni Istanto, M.Si Dr. Hiras Pasaribu, M.Si, Ak, CA Dr. Joko Susanto, SE, M.Si Dr. Hendro Wijonarko, SE, MM Dr. Noto Pamungkas, M.Si |
| Sekretaris | : Sultan, SE, M.Si Drs. Herry Sutanto, MM Endang Wahyuni S., SE Dra. Ec. Eko Wahjoe N, MM Iskak Qomarudin |
| Alamat Redaksi | : Gedung FEB UPN "Veteran" Yogyakarta Jl. SWK 104 Lingkar Utara Condong Catur Yogyakarta 55283 Telp. 0274-486255, Fax. 0274-486255 E-mail: buletinekonomiupnyk@yahoo.com |

Buletin Ekonomi Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan

Diterbitkan oleh FEB UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai media yang bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian maupun telaah teori yang berhubungan dengan ilmu manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan. Buletin Ekonomi terbit setahun dua kali, setiap bulan April dan Desember dengan format A4. Redaksi menerima artikel dari siapapun baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Untuk Informasi Berlangganan dipersilahkan menghubungi Redaksi pada alamat di atas.

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Volume 14, Nomor 1, April 2016

ISSN 1410-2293



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------|------------------|--------------------------|-------------------|
| BULETIN EKONOMI | VOLUME 14 | Nomor 1 | Halaman 1-100 | Yogyakarta April 2016 | ISSN 1410-2293 |
|-----------------|-----------|---------|------------------|--------------------------|-------------------|

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Volume 14, Nomor 1, April 2016

ISSN 1410-2293

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta) | |
| Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyningsih | 1-20 |
| Pengaruh Tekanan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan <i>Job Relevant Information</i> sebagai Variabel Mediator | |
| Zaenal Afifi dan Nanik Ermayanti | 21-32 |
| Perencanaan Karir Untuk Meningkatkan Kesadaran Karir Pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Niaga Politenik NSC Surabaya | |
| Dyah Widowati | 33-40 |
| Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Reputasi Perusahaan terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen | |
| Murni Sulistyowati, Septiana Novita Dewi dan Aris Tri Haryanto | 41-52 |
| <i>Waste Utilization of Renewable Energy Sources Know to be Useful (Biogas)</i> | |
| Noor Azis, Masruki Kabib dan Dwi Soegiarto | 53-64 |
| Optimalisasi Pemanfaatan Aset Terminal Kartasura Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| Triyanto, Betty Eliya Rokhmah dan Ahmad Sidiq | 65-78 |
| Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | |
| Tri Prastiwi, Muhammad Arfan dan Darwanis | 79-84 |
| Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Laba | |
| Lita Yulita Fitriyani, Marita dan Cahayani Budi Astuti | 85-92 |
| Pengaruh Kontribusi Pertambangan terhadap Ekspor pada Kontribusi Pertanian terhadap Ekspor di Indonesia Periode 2007-2013 | |
| Sultan | 93-100 |

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Tri Prastiwi¹

Muhammad Arfan²

Darwanis³

Abstract: *Analysis of the performance of local government districts and cities in the province Aceh on the ratio of local financial independence. This research is aimed to analyze the performance level of local government districts and towns in Aceh based on the ratio of local financial independence of the fiscal year 2013. The issue discussed was “how the performance level of local government of districts and towns in Aceh based on the ratio of local financial independence”. The data used in this research are secondary data. The data are budget realization reports of districts and towns in Aceh for the fiscal year 2013. The source of data is obtained directly from the Financial Agency of Aceh. Data are analyzed by using the ratio of local financial independence. The result shows that the government performance level of districts and towns in Aceh is still very low. This is evidenced by the ratio of local financial independence of districts and towns in Aceh is still in a very low ratio because of external aid dependency is still high.*

Abstrak: **Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Aceh berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2013. Masalah yang dibahas adalah “bagaimana tingkat kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Aceh berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa laporan realisasi anggaran daerah kabupaten dan kota di Aceh tahun fiskal 2013. Sumber data diperoleh langsung dari Dinas Keuangan Aceh. Data dianalisis dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Aceh masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan rasio kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Aceh yang masih berada pada rasio yang sangat rendah karena ketergantungan bantuan dari pihak eksternal masih tinggi.

Kata Kunci: Rasio kemandirian, keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah.

¹ Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

² Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

³ Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang–Undang No 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Fenomena yang terjadi dari adanya penerapan otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah (Pemda) yang tinggi pada pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal juga terlihat dari relatif rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dalam menentukan ukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Bastian, 2010:274). Selanjutnya, kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (MenPAN:2007).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Marsdiasmo, 2006).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio terhadap APBD dapat digunakan untuk (Halim, 2008:230) : Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah; Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan

selama periode waktu tertentu.

Menurut Halim (2008), untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu sebagai berikut: Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah.

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Halim: 2008).

Kemampuan daerah dimaksud dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk dapat membiayai keuangan daerahnya antara lain dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang meningkat, dibandingkan dana perimbangan, semakin besar PAD maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin kecil dan penggunaan surplus anggaran kepada alokasi belanja terutama belanja untuk pengembangan infrastruktur umum daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, obyek, atau peristiwa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasional dengan populasi seluruh Kabupaten/Kota di Aceh (18 kabupaten dan 5 kota).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumenter. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2013.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yaitu:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Perimbangan + lain2 pendapatan daerah yang sah}} \times 100\%$$

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Untuk melihat rasio kemandirian Kabupaten/ Kota di Aceh tahun anggaran 2013 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Aceh Tahun Anggaran 2013

| Kabupaten/ kota | PAD | total pendapatan eksternal | Rasio Kemandirian |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Kab. Aceh Barat | 46.928.106.802,78 | 673.529.662.851,74 | 6,9675 |
| Kab. Aceh Barat Daya | 32.534.985.970,94 | 523.657.517.608,00 | 6,2130 |
| Kab. Aceh Besar | 76.107.259.036,13 | 863.830.390.408,18 | 8,8104 |
| Kab. Aceh Jaya | 20.646.749.350,17 | 472.129.590.075,00 | 4,3731 |
| Kab. Aceh Selatan | 36.181.171.784,68 | 737.659.975.006,00 | 4,9049 |
| Kab. Aceh Singkil | 18.024.823.052,70 | 464.151.866.009,00 | 3,8834 |
| Kab. Aceh Tamiang | 42.592.561.279,66 | 628.348.551.204,98 | 6,7785 |
| Kab. Aceh Tengah | 76.870.446.782,32 | 720.093.940.151,42 | 10,6751 |
| Kab. Aceh Tenggara | 25.620.560.182,10 | 582.546.187.103,00 | 4,3980 |
| Kab. Aceh Timur | 42.805.235.987,63 | 897.529.633.802,00 | 4,7692 |
| Kab. Aceh Utara | 99.869.693.144,17 | 1.471.352.555.852,00 | 6,7876 |
| Kab. Bener Meriah | 18.918.704.154,42 | 486.904.791.322,00 | 3,8855 |
| Kab. Bireuen | 93.893.140.983,71 | 1.029.022.714.361,99 | 9,1245 |
| Kab. Gayo Lues | 20.213.909.298,67 | 510.889.241.609,69 | 3,9566 |
| Kab. Nagan Raya | 37.942.005.577,87 | 622.353.726.698,00 | 6,0965 |
| Kab. Pidie | 76.878.689.101,26 | 946.739.201.420,00 | 8,1204 |
| Kab. Pidie Jaya | 14.052.583.434,81 | 492.635.697.295,00 | 2,8525 |
| Kab. Simeulue | 15.309.778.448,22 | 471.000.287.671,60 | 3,2505 |
| Kota Banda Aceh | 129.122.120.462,00 | 905.808.725.719,00 | 14,2549 |
| Kota Langsa | 57.243.381.959,77 | 545.553.069.011,03 | 10,4927 |
| Kota Lhokseumawe | 36.213.933.082,49 | 632.996.981.578,00 | 5,7210 |
| Kota Sabang | 27.377.339.119,72 | 422.492.065.360,00 | 6,4800 |
| Kota Subulussalam | 8.287.512.018,46 | 354.058.926.052,00 | 2,3407 |
| | | mean | 6,3103 |
| | | min | 2,3407 |
| | | max | 14,2549 |

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Aceh yaitu sebesar 6,31%. Rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh memiliki pola hubungan instruktif yang berarti bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Aceh tergolong rendah sekali, karena tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) masih tinggi. Hal ini berarti kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh masih tergolong rendah. Karena, pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan masih tergantung pada penerimaan pemerintah pusat dan provinsi.

Rasio kemandirian tertinggi sebesar 14,25% diperoleh Kota Banda Aceh dan rasio kemandirian terendah sebesar 2,34% diperoleh Kota Subulussalam. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki kemandirian keuangan tertinggi dibanding dengan Kabupaten/Kota

di Aceh lainnya, dan Kota Subulussalam memiliki kemandirian keuangan terendah dibanding dengan Kabupaten/Kota di Aceh lainnya.

Untuk itu perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan rasio kemandirian yang masih rendah sebesar 6,31%. Yang berarti tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) masih tinggi.

Saran, Perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah ada dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif lainnya dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah rasio yang digunakan, obyek penelitian, tahun yang digunakan dan menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga dapat memperoleh hasil yang lengkap..

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009-2011. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga.

Halim, A. (2008). Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2006). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Mianti, R. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir. Skripsi. Universitas Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah.

_____, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Purwaningsih, I. (2013).